

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

4.1.1 Kondisi Lingkungan

Puskesmas Titi Papan merupakan salah satu puskesmas yang menjadi pusat pembangunan, pembinaan dan pelayanan kesehatan. Puskesmas ini terletak di jalan Platina IV Lingkungagan 10 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli. Puskesmas Titi Papan didirikan pada tahun 1987 sebagai pusat Kesehatan masyarakat dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Medan. Puskesmas Titi Puskesmas selama berdiri dan dalam kepemimpinannya sudah beberapa kali berganti. Sekarang, Kepala Puskesmas Titi Papan adalah dr. Erviyanti, S.MKT.

Kelurahan Titi Papan memiliki 16 lingkungan yang tersebar di wilayah kelurahan Titi Papan. Masing-masing lingkungan dikepalai oleh seorang kepala lingkungan (Kepling). Dengan jumlah penduduk di kelurahan Titi Papan kurang lebih 30.953 .

Tabel 4.1 Data penduduk berdasarkan jenis kelamin

N0	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Perempuan	19.889
2	Laki-laki	11.064
Total		30.953

Tabel 4.2 Data penduduk berdasarkan kelompok umur

No	Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	< 1 Tahun	345	516
2	1-4 Tahun	823	1.235
3	5-14 Tahun	1.520	2.280
4	15-44 Tahun	4.378	4.767
5	45-64 Tahun	2.144	6.566
6	> 65 Tahun	73	117
Total		9283	15.481

5.

Tabel 4.3 Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Keterangan	Jumlah
1	PNS	118
2	TNI/POLRI	513
3	Swasta	628
4	Wiraswasta	238
5	Pensiunan	105
6	Pedagang	547
7	Petani	397
8	Nelayan	31

9	Buruh	2.269
Total		10.546

4.1.2. Kondisi Geografis Lokasi

Puskesmas Titi Papan merupakan salah satu puskesmas yang menjadi pusat Pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan yang terletak di jalan Platina IV Lingkungan 10 Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kelurahan Titi Papan berbatasan dengan;

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Rengas Pulau kecamatan Medan Marelan.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Kota Bangun kabupaten Deli Serdang.
- c) Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan
- d) Sebelah Barat Berbatasan dengan keluraham Tanah Enam Ratus kecamatan Medan Marelan.

Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Titi Papan;

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

- c) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Tanah Enam Ratus kecamatan Medan Marelan.

4.1.3. Sarana dan Prasarana di Puskesmas

Puskesmas Titi Papan memiliki beberapa ruangan yaitu:

- Ruang Kepala Puskesmas
- Ruang KIA/KB
- Ruang Dokter
- Ruang Obat
- Ruang Administrasi
- Ruang Laboratorium
- Ruang Periksa Pasien
- Gudang
- Ruang Poli Gigi
- Dapur
- Ruang Tunggu Poliklinik
- Kamar Mandi
- Ruang Kartu

Adapun sarana penunjang puskesmas yaitu alat bantu yang dimiliki puskesmas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program puskesmas yang mencakup alat transportasi, sarana komunikasi dan informasi, sumberenergi dan lain-lain.

1. Transportasi

Saat ini puskesmas Titi Papan tidak memiliki sarana transportasi baik seperti puskesmas keliling dan ambulance.

2. Komunikasi dan Informasi

Di puskesmas sudah dipasang pesawat telepon dengan nomor telepon (061) 6857720. Puskesmas juga memiliki beberapa unit computer yang membantu dalam pembuatan laporan dan pelaksanaan kegiatan program puskesmas. Kondisi komputer saat ini dalam keadaan baik dan berfungsi.

3. Sumber Energi

Sumber energi yaitu daya yang menggerakkan peralatan dan untuk penerangan yang dimiliki oleh puskesmas. Puskesmas mendapat energi listrik dari PT.PLN yang dapat membantu puskesmas dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin. Puskesmas juga memiliki genset sebagai sumber energi, kondisinya dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi.

4. Prasarana

Puskesmas didukung oleh berbagai sarana seperti: sarana air bersih dari PDAM, sarana pembuangan sampah, sarana pembuangan limbah (SPAL) dan sarana pembuangan tinja. Semua prasarana ini kondisinya semua dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya

4.1.4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Titi Papan

4 dokter umum, 2 dokter gigi, 3 bidan, 4 perawat, 2 kesehatan masyarakat dan 2 ahli gizi, serta 2 Farmasi menjadi tenaga kesehatan Puskesmas Titi Papan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Titi Papan

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	4 Orang
2.	Dokter Gigi	2 Orang
3.	Bidan	3 Orang
4.	Perawat	4 Orang

5.	Kesehatan Masyarakat	2 Orang
6.	Ahli Gizi	2 Orang
7.	Ahli Farmasi	2 Orang
10.	Rekam Medik	1 Orang
Jumlah		20 rang

4.1.5. Karakteristik Informan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap informan yang dijadikan narasumber penelitian, Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu : 1 orang kepala puskesmas, 1 orang pemegang program penurunan stunting, 1 orang pegawai puskesmas selaku pemegang nutrisisionis gizi dan koordinator UKM, serta 1 orang masyarakat yang mempunyai balita stunting. Informan pada penelitian ini 3 perempuan . Latar belakang pendidikan infroman beragam antara lain Dokter, Bidan, dan Tenaga Kesehatan Masyarakat . Karakteristik informan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Karakteristik Informan Penelitian

Inisial Informan	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
IK	43 Tahun	Pr	Dokter	Kepala Puskesmas
IU	43 Tahun	Pr	S1 Kebidanan	Penanggung Jawab Program Penurunan

				Stunting
IT-1	44 Tahun	Pr	S1 Kesmas	Pengelola Prpgram KIA dan Koordinator UKM
IT-2	40 Tahun	Pr	SMA	Masyarakat yang memiliki anak stunting

4.2. Hasil Analisis Data

Hasil analisis data adalah suatu informasi yang diperoleh melalui proses penelitian kemudian hasil tersebut disusun berdasarkan dari tujuan penelitian yang ditambah lagi dari informasi-informasi yang menjadi temuan penelitian selama melakukan penelitian. Adapun hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sebagai berikut :

4.2.1 Implementasi

A. Pelaksanaan Program Stunting

1. Pelaksanaan teknis intervensi kepada anak dalam 1000 HPK

Hasil wawancara mendalam pelaksanaan program intervensi kepada anak dalam 1.000 HPK yang dilakukan kepada informan utama dan informan kunci dengan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau untuk intervensi anak 1.000 HPK sudah terlaksanakan seperti puskesmas ini melakukan pondok gizi yang inovasi pak ginting tadi, lalu ada PMT dan edukasi yang terus dilakukan sampai saat ini” (IK, EY, 43 Tahun).

“Sudah terlaksanakan, seperti adanya sosialisasi terkait pemenuhan gizi dan pemeriksaan ANC kepada para ibu hamil” (IU, YV, 43 Tahun).

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa pelaksanaan program intervensi kepada anak dalam 1.000 HPK disimpulkan bahwa program tersebut sudah dilaksanakan dengan memberi sosialisasi kepada para ibu tentang pemenuhan gizi anak dan pernyataan tersebut juga di dukung oleh pernyataan informan kunci yang menyatakan sudah terlaksanakan dan ada beberapa program intervensi anak 1.000 HPK di Puskesmas Titi Papan.

2. Pelaksanaan Dalam Pemberian Edukasi Kesehatan Reproduksi Serta Gizi Kepada Remaja atau Catin

Hasil wawancara mendalam pelaksanaan program pemberian edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja yang dilakukan oleh informan utama dan informan tambahan dengan pernyataan sebagai berikut:

“stunting ini jugakan edukasinya harus dimulai dari remaja dan para catin, untuk itu kami udah melaksanakan edukasi kepada mereka tentang penyebab dan dampak dari stunting itu. Sama tablet Fe juga kami sudah sosialisasikan kepada mereka” (IU, YV, 43 Tahun).

“Edukasi selain pada ibu hamil dan ibu yang memiliki balita, kami juga rutin melakuka edukasi ke remaja dan para catin” (IP, VS, 44 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas disimpulkan bahwa edukasi tentang kesehatan reproduksi serta pemenuhan gizi pada para remaja dan catin sudah dilaksanakan. Pengetahuan penyebab dan dampak stunting harus diberikan juga pada mereka agar kelak tidak melahirkan anak stunting. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh informan tambahan yang menyatakan edukasi secara rutin terkait kesehatan reproduksi dan gizi juga dilakukan ke remaja dan para catin.

B. Komunikasi dalam kebijakan program penurunan stunting

1. Penyampaian penjelasan kepada Masyarakat terkait kebijakan dalam penurunan stunting.

Hasil wawancara mendalam terkait komunikasi dalam penyampaian kepada masyarakat terkait kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Komunikasi yang dilakukan puskesmas dan kader yang ada dilapangan dengan masyarakat kita selalu sosialisasi kepada mereka terkait stunting dan bisa dibilang edukasi yang diberi pun sudah baik yang kita berikan kepada para masyarakat yang khususnya catin,ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Tapi dalam komunikasi hambatan kita lagi lagi di masyaaraktnya dek, kadang kalua kita lagi edukasi mereka sibuk sendiri, gitu gitu la dek.” (IU, YJ, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas adapat disimpulkan puskesmas sudah melakukan edukasi terkait stunting kepada para masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan informan pendukung yang menyatakan bahwa:

“Ya untuk komunikasi ya kita selalu berupaya untuk selalu memberi edukasi pada Masyarakat untuk stunting ini terikait penyebab dan dampak nya terus penanganannya kita selalu mengkomunikasikan itu. Tapi ya gitula namanya masyarakat ada yang peduli ada yang tidak, ada yang memahami lalu menerapkan ada juga yang mendengar saja” (IP, VS, 44 Tahun)

Dari pernyataan informan pendukung dapat disimpulkan penyampaian pelaksanaan kepada masyarakat terkait kebijakan penurunan stunting yaitu dengan cara sosialisasi memberi edukasi kepada masyarakat yang memiliki balita stunting sudah terlaksana dengan cukup baik. Serta pernyataan informan pendukung dikuatkan oleh pernyataan informan triangulasi sebagai berikut:

“iya ada dan itu biasanya saat posyandu sih dek, selain dikasih makan makan tambahan terus vitamin segala macam baru nanti ada diomongin sama kita ibu-ibu yang ada di posyandu untuk ngasih makan harus diperhatikan gizi-gizi nya tapi ya jujur namanya kadang sambil bawak anak ya kadang anak rewel jadi ya isitlahnya gak pala masuk informasi tadi ”(IT, AI, 30 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan triangulasi tersebut dapat disimpulkan puskesmas titi papan telah mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting.

Komunikasi terkait stunting juga selalu disampaikan kepada para masyarakat namun ada beberapa faktor yang berasal dari masyarakat yang membuat informasi tersebut kurang sampai ke masyarakat

2. Cara Masyarakat dapat memahami tata cara dan langkah pelaksanaan untuk mengikuti kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.

Hasil wawancara mendalam terkait tata cara dan langkah pelaksanaan agar masyarakat dapat mengikuti kebijakan penurunan stunting yang dilakukan informan utama dengan pernyataan sebagai berikut:

“sosialisasi dengan metode pendekatan kepada Masyarakat sih yang bisa kita lakukan agar mereka paham” (IU, YJ, 43 Tahun)

“Lalu ada Kerjasama juga dengan kader di lapangan untuk dapat memberikan edukasi terkait stunting di posyandu bersama puskesmas” (IU, YJ, 43 Tahun).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka diketahui puskesmas Bersama para kadernya di lapangan sudah melakukan pendekatan ke masyarakat dengan sosialisasi stunting di posyandu agar masyarakat dapat mengikuti kebijakan penurunan stunting. Pernyataan informan utama diatas sejalan dengan pernyataan informan kunci berikut :

“Upaya kita untuk hal itu ya turun ke lapangan, melalui posyandu kita memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan penurunan stunting ini” (IK, EY, 43 Tahun).

Pernyataan informan kunci di atas bisa disimpulkan bahwa tata cara dan langkah pelaksanaan agar masyarakat dapat memahami kebijakan penurunan stunting adalah melakukan pendekatan kepada mereka dengan sosialisasi stunting untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait kebijakan penurunan stunting. Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan informan pendukung berikut:

“kita dan para kader berupaya dengan sosialisasi ke masyarakat dengan kebijakan yang ada agar mereka mungkin bisa lebih paham lagi bahwa stunting menjadi masalah kesehatan gizi pada anak yang menjadi prioritas semua lintas sektor saat ini kan” (IP, VS, 44 Tahun).

C. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan program penurunan stunting

1. Seluruh tenaga kesehatan bersedia untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.

Hasil wawancara mendalam terkait disposisi kesiapan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan sebagai berikut :

“Ya kita harus bersedia apalagi kalau dapat laporan ada yang stunting di wilayah kerja puskesmas ini ya harus turun langsung karena emangkan kita dipantau terus dek apalagi kita sempat jadi wilayah yang stunting terbanyak kan saat itu” (IU, YJ, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa disposisi kesiapan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting harus wajib

bersedia untuk pelaksanaan penurunan stunting dilapangan, serta pernyataan informan utama diatas sejalan dengan pernyataan informan kunci sebagai berikut :

“Ya dengan kebijakan walikota yang ada ya puskesmas juga wajib siap untuk melaksanakan kebijakan terkait penurunan stunting di wilayah kerja kami ini. Pihak kecamatan juga sering memantau langsung apakah kebijakan yang ada berjalan atau tidak dek” (IK, EY, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan kunci tersebut dapat disimpulkan bahwa disposisi kesiapan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting harus wajib bersedia untuk pelaksanaan penurunan stunting dilapangan, Adapun pernyataan informan kunci diatas sejalan dengan pernyataan informan pendukung sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan stunting selalu kami laksanakan meningat stunting jadi fokus pemerintah jadi puskesmas pun harus melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat (IP, VS, 44 Tahun).

Jadi dari pernyataan informan pendukung di atas dapat diambil kesimpulan bahwa disposisi kesiapan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting harus wajib bersedia untuk pelaksanaan penurunan stunting dilapangan, serta dikuatkan oleh semua pernyataan informan utama dan informan kunci.

2. Seluruh tenaga kesehatan sigap dalam mengambil dan melakukan Tindakan tanpa melanggar pelaksanaan terkait kebijakan penurunan stunting

Hasil wawancara mendalam terkait disposisi kecepatan para tenaga kesehatan puskesmas titi papan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan sebagai berikut :

“Untuk standar pelayanannya pertama kami melakukan screaning yang dilakukan di posyandu lalu jika ada anak yang gizi buruk langsung di oper ke puskesmas. Di puskesmas nanti masuk dulu ke poli umum lalu poli anak diperiksa sama dokter anak lalu dialihkan ke petugas gizi untuk penanganan selanjutnya. Tapi kalau dia sudah ada kayak anak stunting itu biasanya ada penyakit penyertanya ya ga seperti dulu kalo pendek udah dibilang stunting. Kriteria sekarang adalah anak stunting dengan penyakit penyerta. Nah kalau dia sudah ada penyakit penyertanya nanti melakukan perujukan ke rumah sakit. Initinya kita mencoba menindak lanjutin dengan cepat kalau ada yang terlapor stunting di wilayah kerja puskesmas kami” (IU, YJ, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa disposisi kecepatan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting harus sigap untuk mengambil tindakan jika ada peningkatan stunting dilapangan,serta pernyataan informan utama diatas sejalan dengan pernyataan informan kunci sebagai berikut :

“ya kita diharuskan untuk turun ke lapangan mencari anak yang gizi buruk dari posyandu, kemudian kalau ada dari rumah sakit yang terlapor ke puskesmas itu kita wajib sigap turun. Karena ada anak yang tidak ke posyandu tiba tiba dia ke rumah sakit atau lsm yang menemukan nah itu nanti tinggal laporan ke puskesmas untuk di tindaklanjuti” (IK, EY, 43 Tahun)

Pernyataan informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi kecekatan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting harus sigap untuk mengambil tindakan jika ada peningkatan stunting dilapangan, Adapun pernyataan

informan kunci diatas sejalan dengan pernyataan informan pendukung sebagai berikut:

“jika ditemukan ada yang gizi buruk kita juga cepat untuk menindak lanjutin untuk di tangani di Puskesmas. Mungkin itu sih standar pelayanan untuk anak stunting di Puskesmas ini” (IP, VS, 44 Tahun)

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi kecekatan petugas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting harus sigap untuk mengambil tindakan jika ada peningkatan stunting dilapangan,serta dikuatkan oleh semua pernyataan informan utama dan informan kunci.

D. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan program penurunan stunting

1. Memonitoring pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dilapangan dan capaian program yang sudah berhasil

Hasil wawancara mendalam terkait struktur birokrasi dalam standar operasional prosedur untuk memonitoring pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan berikut:

“Untuk standar pelayanannya pertama kami melakukan screaning yang dilakukan di posyandu lalu jika ada anak yang gizi buruk langsung di oper ke puskesmas. Di puskesmas nanti masuk dulu ke poli umum lalu poli anak diperiksa sama dokter anak lalu dialihkan ke petugas gizi untuk penanganan selanjutnya. Tapi kalau dia sudah ada kayak anak stunting itu biasanya ada penyakit penyertanya ya ga seperti dulu kalo pendek udah dibilang stunting.

Kriteria sekarang adalah anak stunting dengan penyakit penyerta. Nah kalau dia sudah ada penyakit penyertanya nanti melakukan perujukan ke rumah sakit” (IU, YJ, 43 Tahun).

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa struktur birokrasi dalam standar operasional prosedur untuk memonitoring pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan pihak puskesmas titi papan sesuai standar operasional yang ada. Pernyataan berikut sesuai dengan pernyataan informan kunci yang mengatakan:

“mungkin untuk SOP nya sih ya kita diharuskan untuk turun ke lapangan mencari anak yang gizi buruk dari posyandu, kemudian kalau ada dari rumah sakit yang terlapor ke puskesmas itu kita turun. Ada anak yang tidak ke posyandu tiba tiba dia ke rumah sakit atau LSM yang menemukan nah itu nanti tinggal laporan ke puskesmas untuk di tindak lanjuti” (IK, EY,43 Tahun).

“ya, dari jumlah yang lumayan banyak, menurun jadi 11 lalu secara berkala turun jadi 7 kasus dan sekarang ada 5 kasus lagi” (IK, EY, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa puskesmas titi papan sudah melaksanakan kebijakan penurunan stunting ini dengan standar operasional yang ada dan penurunan angka stuntingnya cukup signifikan. Pernyataan informan kunci tersebut di dukung oleh pernyataan informan pendukung berikut:

“standar pelayanan pastinya kita tetap selalu rutin untuk turun ke lapangan mendata ibu yang memiliki balita dan terus memantau berat badan

anaknya lewat posyandu, dan jika ditemukan ada yang gizi buruk kita juga cepat untuk menindak lanjutin untuk di tangani di Puskesmas. Mungkin itu sih standar pelayanan untuk anak stunting di Puskesmas ini.” (IP, VS, 44 Tahun)

“Ya menurut saya dengan penurunan yang cukup signifikan apalagi untuk puskesmas kita yang awalnya menjadi penghasil stunting terbanyak di Kota Medan sekarang sudah turun menjadi 5 kasus. jadi bisa dibilang kebijakan yang ada sudah cukup berhasil untuk mengatasi stunting” (IP, VS, 44 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan pendukung diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa struktur birokrasi dan standar operasional di puskesmas tertiapan terkait kebijakan penurunan stunting ini sudah dilaksanakan dengan baik dan capaian penurunannya juga menurun sangat signifikan.

2. Pengevaluasian dalam setiap pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dilapangan

Hasil wawancara mendalam terkait struktur birokrasi dalam standar operasional prosedur untuk pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan sebagai berikut :

“Kriteria anak stunting sekarang adalah anak dengan penyakit penyerta. Nah kalau dia sudah ada penyakit penyertanya nanti melakukan perujukan ke rumah sakit. Tapi kalau dari pihak rumah sakit sudah menyatakan kondisi anak sudah membaik maka dibalikin lagi ke kita untuk puskesmas membantu mengontrol anak tersebut. Nah dari situ nanti kita akan intens melakukan perawatan kepada anak tersebut.” (IU, YJ, 43 Tahun)

“Kita juga untuk stunting ini data nya terus kita diskusikan dengan semua tenaga kesehatan yang berkaitan dengan stunting dipuskesmas ini untuk terus menciptakan inovasi gerakan agar capaian kita untuk penurunan stunting ini bisa tercapai” (IU, YJ, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa struktur birokrasi dalam standar operasional prosedur untuk pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dengan cara berdiskusi untuk menciptakan inovasi baru agar capaian penurunan stunting di wilayah kerja puskesmas titi papan tercapai. Pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan informan kunci yang mengatakan:

“Ada namanya data MPPGN kita, jadi nanti dimasukkan ke dalam data itu sehingga dinas Kesehatan bisa meng cross check seluruh balita yang ada di wilayah kerja dan selalu dilakukan evaluasi setiap 6 bulan terhadap apa yang kurang tentang kebijakan penurunan stunting ini” (IK, EY, 43 Tahun)

Dari pernyataan informan kunci diatas diketahui bahwa puskesmas titi papan juga telah melakukan evaluasi di setiap program stunting, terkhusus stunting data anak balita tersebut ada data MPPGN yang terhubung langsung dengan dinas kesehatan kota medan sehingga terus dipantau dan di evaluasi. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh pernyataan informan pendukung yang mengatakan:

“Evaluasi program stunting ini juga dilakukan oleh puskesmas dan para kader posyandu juga dinas kesehatan kota medan, dukungan dinkes sejauh ini juga baik. Stunting ini juga terus dipantau oleh dinkes perkembangannya seperti apa” (IP, VS, 44 Tahun)

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam standar operasional prosedur untuk pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penurunan stunting melalui diskusi yang rutin dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang terkait stunting di puskesmas titipapan dan juga berdiskusi pihak dinas kesehatan kota medan.

E. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting

1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dilapangan

Hasil wawancara mendalam terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan sebagai berikut :

“untuk sumberdaya sebenarnya semua nya berkompetensi tapi masih ada merangkap pekerjaan karena ya mungkin menurut saya kurang tenaga ahli sih dek khususnya untuk program stunting ini ya. Nah tapi untungnya pas kita turun ke lapangan ada kader kader si yang membantu”. (IU, YJ, 43 Tahun)

“Kalo untuk sumber daya manusia terkait tenaga kesehatan untuk kader kader posyandu juga sekarang puskesmas ingin melakukan pelatihan agar kader kita juga punya cukup pengetahuan untuk bisa mengedukasi untuk itu udah ada di POA kita” (IU, YJ, 43 Tahun)

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting belum memadai,serta pernyataan informan utama diatas tidak sejalan dengan pernyataan informan kunci sebagai berikut:

“ SDM yang dimiliki terkait stunting ini ya mereka punya dasar Pendidikan gizi jadi ya mereka punya la kompetensi untuk penurunan stunting ini. Jadi ya sudah memadai” (IK, EY, 43 Tahun)

Sedangkan pernyataan informan kunci diatas sejalan dengan pernyataan informan pendukung yang mengatakan:

“menurut saya SDM di Puskesmas ini yang berkaitan dengan stunting sudah cukup baik dan memadai”. (IP, VS, 44 Tahun)

Pernyataan informan utama, informan kunci dan informan pendukung bisa disimpulkan bahwa sumber daya manusia di puskesmas titi papan sudah memadai namun masih ada tumpang tindih pekerjaan yang membuat beberapa tenaga kesehatan di puskesmas titi papan sedikit kesulitan dengan hal itu.

2. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dilapangan

Hasil wawancara mendalam terkait sumber daya dalam sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan sebagai berikut:

“sarana dan prasarana di puskesmas ini udah memadai untuk implementasi kebijakan penurunan stunting sendiri” (IU, YJ, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa dalam sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sudah memadai. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan kunci sebagai berikut:

“SDM yang ada sudah memadai dengan sarana prasarana yang sudah memadai juga jadi implemenasi kebijakan penurunan stunting terlaksana dengan baik. Untuk puskesmas ini sendiri pun kemarin baru ada sedikit pembangunan lah biar ga sempit kali dan itu suda”. (IK, EY, 43 Tahun)

Pernyataan imforman kunci diatas bahwa sarana dan prasarana di puskesmas titi papan sudah memadai. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan imforman pendukung sebagai berikut:

“Menurut saya untuk sarana dan prasarana untuk penurunan stunting sudah baik, bisa dibilang memadai” (IP, VS, 44 Tahun)

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sudah memadai dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting dilapangan.

F. Lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting

1. Lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting

Hasil wawancara mendalam terkait lingkungan social dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan kepada informan utama dengan pernyataan sebagai berikut:

“Hambatan kebanyakan dari luar ya dari masyarakatnya sendiri. Kadang banyak ibu yang sudah punya anak di usia dini yang membuat mereka mungkin belum cukup ilmu untuk mengetahui gizi anak. jadi hal yang bisa

dilakukan untuk mengatasinya ya tidak ada cara lain selain melakukan edukasi. Karena kalau kita selalu memberi mereka tidak akan merubah polanya tadi jadi hanya bisa dilakukan edukasi". (IU, YJ, 43 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa lingkungan sosial dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait gizi anak. Adapun pernyataan informan utama diatas sejalan dengan pernyataan informan kunci sebagai berikut:

"dalam pelaksanannya ketika kita turun intervensi banyak ibu atau masyarakat yang tidak memberi feedback artinya ketika kita kasih penyuluhan, kita suruh timbang banyak orang tua yang tidak datang. Banyak juga masyarakat yang mislanya diberitahu kalo anaknya gizi buruk atau stunting besok besok ga mau lagi datang ke posyandu karena mereka malu karena anaknya dinyatakan gizi buruk seharusnya kan tidak begitu karena puskesmas sendiri kan sudah cukup optimal membantu dengan memberikan susu, PMT, vitamin. Namun emang ibunya yang kurang responsive dengan Kesehatan anaknya. Jadi untuk hambatan implementasi itu sih hambatannya." (IK, EY, 43 Tahun)

Pernyataan informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pola asuh dan ketidak perdulian masyarakat terhadap kesehatan anaknya, Adapun pernyataan informan kunci diatas didukung dengan pernyataan informan pendukung sebagai berikut:

“menurut saya hambatan dari Masyarakat sendiri, kurangnya kesadaran mereka terhadap kesehatan anaknya. Selain kesadaran ada juga kondisi Masyarakat yang membuat mereka tidak responsive seperti mungkin banyak ibu yang berkerja juga jadi tidak punya waktu untuk membawa anaknya ke posyandu, terus faktor ekonomi dan pengetahuan para ibu juga mempengaruhi dalam implementasi terkait penurunan stunting di wilayah kerja puskesmas ini” (IP, VS, 44 Tahun)

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pola asuh dan ketidak perdulian masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, serta pernyataan informan pendukung dikuatkan oleh pernyataan informan triangulasi sebagai berikut:

“ya gimana ya dek, saya dan suami kerja jadi anak saya sama neneknya dirumah. Neneknya ya untuk ke posyandu mungkin lupa lupa ingat. Yang penting kan tetap makan ya selama ini sehat sehat aja kok” (IT, AI, 30 Tahun)

“iya stunting tau tau gitulah dek, tentang gizi. Lumayan kaget juga memang ada berapa yang meninggal tahun lalu kalo gasalah cuman menurut saya bukan karena stunting lah keknya, kemaren ada penyakit jantungnya. Tapi kalo dari kader sama puskesmas bilanganya stunting” (IT, AI, 30 Tahun)

Dari pernyataan informan triangulasi di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya ketidak perdulian dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu. Kebanyakan sehingga dapat menghambat penurunan stunting dilapangan.

4.2.2 Pembahasan

1. Gambaran program intervensi stunting berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi terkait intervensi stunting. Pemerintahan Kota Medan juga telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif yang potensial untuk menurunkan stunting. Peraturan penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif yang ditujukan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas di masing kecamatan. Puskesmas Titi Papan telah menjalankan kebijakan yang ada terkait intervensi penurunan stunting dengan mendirikan pondok gizi yang ditujukan untuk anak 1000 HPK. Puskesmas Titi Papan mendirikan pondok gizi sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting untuk memastikan anak-anak yang ada diwilayah kerjanya mendapatkan makanan yang thalyban (baik). Baik dalam segi kemanfaatannya yang mengandung gizi cukup untuk pertumbuhan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edriani & Hasibuan (2023) di Upt. Puskesmas Terjun Kota Medan, Melalui program Perwal Medan, pemerintah Kota Medan telah menyediakan kebijakan yang membahas konvergensi percepatan penurunan stunting dengan menggunakan intervensi gizi tepat sasaran dan gizi sensitif

yang ditargetkan untuk 1000 anak HPK, yang dilaksanakan oleh sektor kesehatan dengan memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusianya. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi gizi sehat melalui keluarga, serta penguatan seribu hari pertama kehidupan (HPK).

Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saragih & Gurning, (2023) bahwa konvergensi yang melibatkan semua pemangku kepentingan membuat kebijakan stunting menjadi efektif, dan bahwa membangun pondok gizi sebagai intervensi gizi khusus adalah cara yang sangat efektif untuk mempercepat penurunan stunting.

Anjuran mengkomsumsi makanan dengan gizi yang cukup terdapat didalam QS. Al-Maidah : 88, yang dalam tafsir kementerian agama menjelaskan perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk mengkomsumsi makan yang halal dan baik dalam arti luas.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. al-Ma’idah/5:88).

Berdasarkan beberapa riwayat bahwa asbabun nuzul dari turunnya surah Al-Maidah ayat 88 ini, disebabkan adanya perilaku sebagian sahabat rasul yang mulai

tertarik bahkan menjadi kehidupan seperti rahib yaitu meninggalkan kehidupan dunia. Padahal dalam ajaran Islam hal itu tidak diperbolehkan, maka dari itu turunnya surah ini sebagai bentuk teguran bagi orang yang mengharamkan barang baik yang dihalalkan Allah.

2. Gambaran Komunikasi

Implementasi akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kebijakan tersebut dapat dipahami oleh seluruh pihak. Gambaran komunikasi dalam penyampaian dan tinjauan implementasi kebijakan penurunan stunting di UPT Puskesmas Titi Papan sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pemerintah Kota Medan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan seluruh informan. penurunan stunting dengan cara bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki anak balita yang mengalami stunting agar para orang tua dari anak balita tersebut dapat memahami kebijakan yang berkaitan dengan stunting sehingga dapat menurunkan angka kejadian stunting.

Puskesmas Titi Papan secara teratur mendistribusikan informasi kepada masyarakat tentang risiko stunting melalui staf medisnya. Mereka secara konsisten menyarankan masyarakat untuk fokus pada pemberian nutrisi terbaik bagi anggota keluarga, terutama bayi yang baru lahir. Meskipun masih ada beberapa orang yang percaya bahwa stunting bukanlah masalah kesehatan yang harus menjadi perhatian mereka, respons masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat, variabel

kontekstual sosial, dan ketidakpedulian orang tua terhadap kesehatan anak menjadi penghambat dalam penerapan program-program yang bertujuan untuk menurunkan stunting.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azahra (2023), bahwa komunikasi yang digunakan untuk membuat strategi komunikasi-yang dibagi menjadi empat pilar-menentukan apakah suatu program atau kebijakan berhasil atau tidak berhasil. Hal ini terutama berlaku dalam hal tujuan komunikasi, yang mencakup berbagai macam audiens. Pencegahan stunting adalah metode implementasi program di bidang kesehatan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan gizi anak dan menanggulangi stunting.

Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian Fallo (2020), Dalam menerapkan kebijakan ini, komunikasi menjadi pertimbangan penting. Dari perspektif komunikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan strategi pencegahan stunting. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan perlu menyampaikan kebijakan secara efektif dan melalui saluran yang tepat.

Dalam Islam diperkuat dalam QS. *an-Nisa:9* ;

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah

mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. an-Nisa’/4:9).

Asbabun nuzul ayat ini dilatarbelakangi kisah Saad bin Abi Waqas yang hendak menyerahkan harta untuk diinfakkan. Maka Rasulullah bersabda,

“Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Al-Quran dan Tafsirnya ayat tersebut dengan tegas Allah berpesan kepada para generasi tua untuk tidak membiarkan generasi muda sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan menjadi generasi yang lemah. Generasi yang tidak mengemban fungsi dan tanggung jawabnya. Upaya pemberdayaan generasi penerus merupakan tanggung generasi sebelumnya yaitu pemimpin, dan orang tua.

3. Gambaran Disposisi

Gambaran disposisi dalam menjalankan kebijakan program penurunan stunting di puskesmas titi papan berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan seluruh informan, sesuai dengan standar Pemerintah Kota Medan No. 18 tahun 2020 tentang penurunan stunting, Puskesmas Titi Papan telah memenuhi persyaratan tersebut dalam hal komitmen dan kemauan petugas dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2020 tentang penurunan stunting berkaitan dengan komitmen dan kesiapan petugas dalam menjalankan tugasnya. Semua petugas dituntut untuk sigap dan siap berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki balita stunting dan menjalankan kebijakan dalam penurunan stunting. Komunitas global

berupaya untuk menurunkan jumlah kasus stunting di berbagai negara, sesuai dengan tujuan global yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Stunting tidak lagi hanya menjadi isu nasional.

Hasil observasi diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chaeriah (2024), Keberhasilan kebijakan penanganan stunting sangat ditentukan oleh komitmen dari setiap pelaksana kebijakan, terutama di wilayah tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam hal ini, keberhasilan program percepatan penanganan stunting membutuhkan lebih dari sekadar komitmen. Komitmen ini perlu didukung oleh kinerja yang kuat dan diimplementasikan secara terencana dengan mengutamakan peraturan dan kebijakan. Sekuat apapun pengabdian tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa kinerja yang baik.

Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian Pakaya (2023), Kondisi karakter dan sifat yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan menentukan seberapa besar keberhasilan suatu kebijakan. Watak seseorang memiliki peran yang cukup besar dalam seberapa baik sebuah kebijakan diimplementasikan, jika watak yang dimiliki cukup kuat, maka ia akan mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki komitmen yang baik, diperlukan pemilihan dan penentuan personil pelaksana kebijakan yang cermat.

Allah SWT telah mengingatkan setiap umat manusia agar memiliki sifat komitmen, kejujuran, dan demokratis saat melakukan pekerjaannya. Dalam islam, Allah SWT berfirman;

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzaab : 72)

Tafsir dari ayat ini ialah setelah meminta orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan, Allah lalu menjelaskan bahwa salah satu wujud takwa adalah menjaga amanah. “Amanat” kalau diartikan secara sempit adalah kewajiban-kewajiban agama. Namun, secara luas ia bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang diserahkan kepada seseorang ditunaikan dengan sebaik-baiknya serta berusaha maksimal untuk tidak menyia-nyiakannya. Apa pun bentuk amanat itu, ia harus dipertanggungjawabkan oleh penerima kepada pemberi amanat.

4. Gambaran Struktur Birokrasi

Gambaran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program penurunan stunting dalam SOP, evaluasi, dan hasil di Puskesmas Titi Papan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 18 Tahun 2020 tentang penurunan stunting, yaitu dengan melakukan evaluasi dalam kurun waktu 6 bulan setelah program berjalan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan stunting. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan setiap informan, hal inilah yang telah ditetapkan. Setiap tingkat administrasi melakukan penguatan koordinasi sesuai

dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kebijakan pencegahan stunting memerlukan prosedur khusus (SOP) untuk dilaksanakan guna mengurangi kesalahan di lapangan. Seluruh pelaksana hingga kader kesehatan harus memahami SOP tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa puskesmas Titi Papan elum telah memasukkan pelatihan untuk kader dalam rencana aksi mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fahzira, (2021), Struktur birokrasi yang ada saat ini terkait erat dengan pelaksanaan strategi pengurangan stunting. Tanggung jawab dan fungsi utama pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten didefinisikan secara singkat dalam pedoman kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan pemerintah, dan sudah ada instruksi untuk melaksanakan program pengurangan stunting.. Hal yang sama juga dikatakan Mudi (2022) bahwa implementasi kebijakan secara signifikan dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Akibatnya, mereka yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan akan memahami peran dan yurisdiksi mereka. Salah satu aspek yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan adalah tingkat kejelasan distribusi kekuasaan dan tanggung jawab di antara para pelaksana.

5. Gambaran Sumber Daya

Berdasarkan data observasi dan kualitatif, rangkuman data harian dalam implementasi kebijakan penurunan angka stunting belum sesuai dengan Perwal Kota Medan No. 18 Tahun 2020. Puskesmas Titi Papan masih kekurangan tenaga ahli dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, yang mana adanya tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan implementasi kebijakan penurunan stunting di wilayah kerja Puskesmas Titi Papan belum maksimal. Selain kuantitas, sumber daya manusia

juga harus diperhatikan kualitasnya, atau keterampilan dan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia saat memulai proyek.. Faktor kunci dalam menentukan efektivitas suatu proses implementasi kebijakan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Shauma & Purbaningrum (2022), Implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya tidak memiliki alat yang diperlukan untuk melakukannya. Setelah komunikasi, sumber daya adalah aspek kedua yang akan mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Semua alat yang digunakan untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan berhasil diimplementasikan disebut sebagai sumber daya kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edriani (2023) Sumber daya merupakan komponen penting dalam proses implementasi kebijakan, dan efektivitas suatu kebijakan juga ditentukan oleh seberapa baik kebijakan tersebut memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini terdiri dari infrastruktur dan sumber daya manusia.

Allah telah menjelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sumber daya hendaknya melalui hikmah, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Ayat ini diturunkan agar dibuat perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad mengenai cara berdakwah yang menekankan hikmah. Mengutip dari situs Kementerian Agama RI, hikmah memiliki beberapa arti, yaitu pengetahuan tentang faedah dan rahasia sesuatu, perkataan tepat yang dijadikan argumen, mengetahui hukum-hukum Al-Quran, memperlihatkan contoh yang baik, dan takut kepada Allah SWT. Metode dakwah yang telah dijelaskan Allah tersebut ditujukan untuk orang-orang yang sesat.

Maka dari itu dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau suatu kebijakan maka tidak akan jauh dari permasalahan kinerja petugas dan sarana prasarana yang juga menunjang keberlangsungan program serta capaiannya, apabila tidak tersedianya sarana prasarana yang layak untuk mendukung suatu program maka tentu saja program tersebut tidak akan mampu terlaksanakan dengan baik.